BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 182 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disperdagin adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian serta Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Disperdagin yang selanjutnya disebut Renstra Disperdagin adalah dokumen perencanaan Disperdagin untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Disperdagin yang selanjutnya disebut Renja Disperdagin adalah dokumen perencanaan Disperdagin untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Disperdagin yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Disperdagin, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Disperdagin adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Disperdagin untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Disperdagin Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Disperdagin untuk melaksanakan rencana kerja Disperdagin;
(2) Renja Disperdagin Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Disperdagin tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Disperdagin;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Disperdagin dengan dokumen RKPD dan Renstra Disperdagin;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Disperdagin yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Disperdagin digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja Disperdagin selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA DISPERDAGIN

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Disperdagin Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Disperdagin tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA DISPERDAGIN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Disperdagin menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Disperdagin meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Disperdagin sesuai dengan tugas dan fungsi Disperdagin;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Disperdagin dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Disperdagin.

Pasal 7

(1) Disperdagin membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Disperdagin.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Disperdagin disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Disperdagin tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Disperdagin melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disperdagin dan evaluasi hasil Renja Disperdagin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan disperdagin terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Disperdagin.

(3) Kepala Disperdagin menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Disperdagin.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Disperdagin dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DISPERDAGIN

Pasal 9

(1) Renja Disperdagin dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Disperdagin beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Disperdagin tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 182

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 182 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
P E N D A H U L U A N

I. 1. Latar Belakang

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2026 pada dasarnya sudah ditempuh tahapan penyusunan secara sistematis, yakni persiapan melalui proses sebagai berikut: (a) pengolahan data dan informasi; (b) analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (c) me-review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra 2021-2026; (d)

penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (e) penelaahan Penetapan RKPD kabupaten; (f) perumusan tujuan dan sasaran; (g) penelaahan usulan masyarakat; dan (h) perumusan kegiatan prioritas.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

o. Peraturan Bupati Bandung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 100)

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama Tahun 2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah :

1. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2026;

2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun yakni tahun 2021-2026 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2026;

3. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Pada Tahun 2026;

4. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2026;

5. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2026. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program dan kegiatan prioritas;

6. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2026;

7. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Penetapan rencana kerja anggaran perubahan (RKA) Tahun 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (S*ustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap Rancangan RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

   Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk belanja sebesar Rp52.068.382.925 *(Lima puluh dua miliar enam puluh*

delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan ini :

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	99.930.000	95.280.650	95%
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.930.000	95.280.650	95%
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0%
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.900.000	80.620.650	100%
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.030.000	14.660.000	77%
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.681.204.603	36.789.097.431	95%
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	369.107.538	349.211.600	95%
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.661.538	159.036.000	95%
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100%
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.340.000	93%
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.980.000	100%
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.446.000	83.226.000	96%
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	72.629.600	91%
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.519.684.686	32.926.006.456	95%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.450.684.686	32.864.797.056	95%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	26.479.800	88%
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.994.800	100%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.000.000	29.734.800	87%
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0%
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0%
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0%
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.598.138	414.706.503	93%
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.494.100	100%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.071.700	153.777.159	99%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.459.000	140.676.292	99%
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.976.000	13.564.000	91%
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.562.438	13.400.000	92%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.029.000	85.794.952	76%
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.710.000	197.746.500	93%
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.710.000	153.235.500	91%
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	45.000.000	44.511.000	99%
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.503.282.280	2.435.529.680	97%
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.389.400	146.431.590	78%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.315.892.880	2.289.098.090	99%
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.480.000	234.181.804	88%
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.612.000	42.162.938	89%
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.150.000	68.324.766	73%
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.705.000	89.328.500	100%
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.013.000	34.365.600	98%
3.30.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	363.341.961	231.714.888	64%
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	363.341.961	231.714.888	64%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	77.660.000	54.834.000	71%
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	47.660.000	32.489.600	68%
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	47.660.000	32.489.600	68%
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	13.934.800	93%
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	13.934.800	93%
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15.000.000	8.409.600	56%
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	15.000.000	8.409.600	56%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.546.044.798	1.437.723.692	93%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.461.769.598	1.355.432.392	93%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.232.319.598	1.128.610.392	92%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	229.450.000	226.822.000	99%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	84.275.200	82.291.300	98%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	84.275.200	82.291.300	98%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.570.442.943	3.494.610.450	98%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	124.267.800	113.204.000	91%
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	124.267.800	113.204.000	91%
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	0%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.429.270.343	3.364.502.050	98%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	24.999.600	100%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	18.028.400	18.028.000	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.386.241.943	3.321.474.450	98%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.904.800	16.904.400	100%
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-	-	0%
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	16.904.800	16.904.400	100%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	0%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.355.622.000	1.315.576.608	97%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.355.622.000	1.315.576.608	97%
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	1.150.000.000	1.144.792.300	100%
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	69.840.000	63.689.800	91%
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100.000.000	79.792.508	80%
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	35.782.000	27.302.000	76%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	292.996.329	265.391.100	91%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	292.996.329	265.391.100	91%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	224.974.009	199.906.400	89%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	68.022.320	65.484.700	96%
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	-	-	0%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	87.023.000	86.698.250	100%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	87.023.000	86.698.250	100%
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	75.000.000	74.675.250	100%
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12.023.000	12.023.000	100%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.746.948.190	8.046.367.558	92%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.746.948.190	8.046.367.558	92%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	349.929.000	344.907.400	99%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	813.986.000	638.540.296	78%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.509.993.190	6.989.879.862	93%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	73.040.000	73.040.000	100%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	129.290.000	119.644.500	93%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	129.290.000	119.644.500	93%
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	102.105.000	92.874.000	91%
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	27.185.000	26.770.500	98%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	386.352.221	363.158.686	94%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	386.352.221	363.158.686	94%
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	88.093.200	85.729.950	97%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	265.984.200	245.172.636	92%
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	32.274.821	32.256.100	100%

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran yang berbentuk *output* pada tahun 2024, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 berdasarkan pada *outcome* setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.2

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	100%	80%	80 %	80%	100%	80 %	80%	80%
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	100%	90%	80 %	95%	119%	80 %	88%	88%
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Dokumen	3 Dokumen	-	-	0%	0 Dokumen	3 Dokumen	80%
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan dan jumlah dokumen informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi yang dikeluarkan	10 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	9 Dokumen	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	85 Laporan	51 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	85 Laporan	100%
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	87,00	83 Poin	84 Poin	84,60 Poin	101%	86 Poin	83 Poin	95%
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	11 Dokumen	110%
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	100%
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	100%
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	223 Orang/bulan	223 Orang/bulan	100%	223 Orang/bulan	223 Orang/Bulan	100%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	100%
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin pegawai	79%	88%	79 %	-	0%		63%	80%
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	14 Orang	-	-	0%		14 Orang	67%
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	6 Paket	120%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	112 Laporan	72 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	20 Laporan	120 Laporan	107%
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535 Laporan	375 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	100%	80 Laporan	625 Laporan	117%
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	3400%	3400%
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%		5 Unit	250%
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	0 Unit	12 Unit	171%
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	3400%	3400%
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	3400%	3400%
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	43 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	10 Unit	79 Unit	107%
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	39 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	63 Unit	105%
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	24 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	40 Unit	100%
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
3.30.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	50%	100 %	100 %	100%	100 %	83%	83%
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	3600%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	80%	64%	70 %	70 %	101%	75 %	68%	85%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin	80%	77%	70 %	88 %	126%	75 %	78%	98%
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	30%	16%	20 %	37%	186%	25 %	24%	81%
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	50%	39%	10 %	46%	456%	10 %	46%	91%
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		5 Dokumen	167%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	25%	21%	21 %	23 %	111%	23 %	21%	84%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	75%	66%	65 %	67 %	103%	70 %	2266%	3021%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	10 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	16 Unit	533%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55 Unit	58 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	80 Unit	145%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	13,0%	7,5%	8 %	11,85%	158%	10 %	8%	58%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3%	3%	3 %	2,952 %	102%	3 %	3%	99%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	54%	78%	80 %	97,93%	122%	53 %	85%	158%
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga dan stok BAPOKTING di tingkat pasar Kabupaten/Kota yang dikendalikan	89%	100%	89 %	117%	131%	89 %	102%	114%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 Laporan	36 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	100%	12 Laporan	144 Laporan	240%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60 Laporan	24,00	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	2,00	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	100%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer	90%	54%	90 %	90 %	100%	45 %	78%	87%
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	60 Laporan	25 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	27 Laporan	45%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Eksport Bersih Perdagangan Non Migas	$ 727.432.463	$ 1108872543,35	727.141.781 $	1.683.417.520 $	232%	727287122 $	$ 1108872543,35	152%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	15%	4%	4 %	11,11 %	278%	3 %	19%	127%
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100%	4 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	67%
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	100%	5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	100%
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100%	1 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	60%
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	75 Produk	45 Produk	15 Produk	15 Produk	100%	15 Produk	75 Produk	100%
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP sesuai standar	100%	88%	90 %	90 %	100%	95 %	89%	89%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah	100%	50%	40 %	47 %	116%	95 %	62%	62%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000 Unit	11739 Unit	5.000 Unit	5.276 Unit	106%	5000 Unit	22015 Unit	110%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 Orang	590 Orang	350 Orang	350 Orang	100%	200 Orang	1290 Orang	129%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	42%	28%	28 %	45,61%	163%	35 %	28%	67%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	100%	60%	60 %	60%	100%	80 %	60%	60%
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120 UMKM	90 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	100%	40 UMKM	190 UMKM	158%
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	120 UMKM	80 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	100%	10 UMKM	160 UMKM	133%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	100%	60%	60 %	61,40 %	102%	80 %	60%	60%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	25 Dokumen	11 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	21 Dokumen	84%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	120%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 dokumen	3 Dokumen	-	-	0%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	200%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	160%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	15%	10%	10 %	24,00 %	240%	12,5 %	10%	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	100 Perusahaan	132 Rekomendasi	95 Rekomendasi	99 Rekomendasi	104%	20 Perusahaan	95 Rekomendasi	95%
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kabupaten/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain Bidang usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pelaporan SIINAS	100%	60%	60 %	60,00 %	100%	20 %	60%	60%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	100%	60%	60 %	70 %	117%	20 %	60%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah tidak maksimal.

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada misi Kepala Daerah, misi ke 1 (satu) yaitu: *"Membangkitkan Daya Saing Daerah"* merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan "Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera". Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produktivitas perindustrian	Tertatanya sentra industri	Merencanakan dan membangun sentra industri	Penetapan sentra industri
			Optimalisasi standardisasi produk IKM

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
yang berdaya saing			Optimalisasi pendampingan IKM dalam pemasaran produk
			Optimalisasi sarana dan prasarana IKM
	Meningkatnya kepatuhan industri	Meningkatkan pengendalian izin dan pengawasan industri	Optimalisasi perizinan perusahaan industri
	Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini	Meningkatkan Pengelolaan Pelaporan Produksi pada SIINAS	Peningkatan Monitoring dan Pendampingan dalam pelaporan Produksi melalui SIINAS
Meningkatnya pelayanan distribusi barang di dalam wilayah	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan di wilayah	Meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada pasar rakyat dan pedagang kaki lima	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat
			Pembinaan dan penataan PKL di lingkungan pasar rakyat
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan
			Fasilitasi penerbitan rekomendasi tanda daftar Gudang
			Fasilitasi penerbitan rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang bagi Wajib Tera Ulang
			Monitoring dan Evaluasi terhadap alat UTTP pasca Tera/Tera ulang & Pembinaan/penyuluhan Metrologi Legal
Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	Meningkatkan Nilai Ekspor	Peningkatan promosi luar negeri
			Pembinaan dan Pengembangan produk ekspor
			Peningkatan produk ekspor
		Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk Kabupaten Bandung	Pelaksanaan Promosi Produk melalui *event* pameran
			Pelaksanaan kerja sama dengan media *online* sebagai upaya pemasaran produk
		Mendorong stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi
			Monitoring dan Evaluasi bahan pokok dan barang penting
Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi	Meningkatnya kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi	Mewujudkan penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan instansi organisasi	Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi	Peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi

Upaya-upaya diatas merupakan program kegiatan prioritas yang terdapat pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat meningkatkan anggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sesuai dengan perencanaan kebutuhan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 T-C. 30

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PERDAGANGAN									
1	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	$726.851.099	$726.996.440	$727.141.781	$727.287.122	$727.432.463	$ 1.108.872.543	$ 1.683.417.520	$727.287.122	
2	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	14%	21%	28%	35%	42%	21,4%	45,6%	35%	
3	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3%	3%	3%	3%	3%	2,91%	2,95%	3%	
4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	20%	20%	22%	23%	25%	20%	23%	23%	
5	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	60%	65%	70%	75%	80%	65%	70%	75%	
6	Persentase Alat UTTP sesuai standar	80%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	
	URUSAN PERINDUSTRIAN									
7	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	20%	40%	60%	80%	100%	56%	61,4%	80%	
8	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	5%	8%	10%	13%	15%	9%	24%	13%	
9	Persentase pelaporan SIINAS	20%	40%	60%	80%	100%	52%	60%	80%	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM									
10	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	

Tabel 2.5

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

No.	TUJUAN PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah	Meningkatnya Persentase Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor x 100%/ Nilai PDRB	BPS
		Meningkatnya Presentase Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan x 100%/ Nilai PDRB	BPS

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Utama tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1

SASARAN 1	**Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor**					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Ekspor Produk IKM	$726,996,440.00	$1108872543,35	153%	727.141.781 $	1.683.417.520 $	231,51%

Kinerja Ekspor Kabupaten Bandung meningkat. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai ekspor produk IKM sebesar 232% yaitu dari target sebesar $727.141.781,00 terealisasi sebesar $1.683.417.519,73 Realisasi Nilai ekspor produk IKM Sebesar $1.683.417.519,73 artinya Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor tercapai 232%. Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Kinerja Ekspor Kabupaten Bandung meningkat, Capaian tahun 2024 lebih besar $574.544.976,38 dengan kenaikan capaian sebesar 79%.Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Ekspor Kabupaten Bandung tahun 2024 sudah berada pada batas aman mencapai 231% yaitu dari target akhir renstra sebesar $727.432.463 terealisasi pada tahun 2024 sebesar $1.683.417.519,73. Dilihat pada skala nasional, Nilai ekspor produk IKM tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatan pemahaman pelaku usaha di bidang ekspor di wilayah Kabupaten Bandung terhadap peratuan dan kebijakan pengurusan dokumen ekspor yang sering mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 kegiatan ini diikuti sebanyak 3 pelaku usaha ekspor.
2. Pengembangan data base informasi potensi unggulan.
   Pengembangan data base informasi potensi unggulan ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki produk potensi unggulan ekspor, sehingga tersedianya data base informasi potensi produk unggulan produk ekspor dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekspor dan memudahkan informasi tentang pasar tujuan ekspor.

3. Peningkatan citra produk ekspor

   Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi / pengusaha bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat untuk melakukan ekspor produk dari Kabupaten Bandung ke luar negeri serta peluang pasar tujuan ekspor baru yang dapat di intervensi oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga produk ekspor Kabupaten Bandung tidak hanya didominasi oleh tekstil dan produk tekstil saja tetapi komoditas lainnya, saat ini mulai muncul komoditas baru di Kabupaten Bandung yang menjadi potensi ekspor diantaranya kopi, Peningkatan citra produk ekspor berhasil mengubah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi sebanyak 15 produk.

4. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

   Dalam rangka meningkatkan promosi penggunaan produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pameran bagi produk unggulan Kabupaten Bandung sejumlah 50 UMKM yang difasilitasi promosi dan pemasarannya. dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp74.675.250 atau sebesar 99,57%.

5. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

   Dalam meningkatkan pemasaran produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi terhadap 40 IKM dengan anggaran sebesar Rp12.023.000 dan terealisasi sebesar Rp. Rp12.023.000 atau sebesar 100%.

6. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional dan mengurangi angka inflasi daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai saat ini memiliki inovasi daerah yaitu aplikasi SIBAPOKTING yang menunjukan harga dan ketersediaan stock barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan data paling update dan *real time*. Selain itu, dilakukan juga Operasi Pasar Murah (OPM) ketika terjadi kelangkaan bahan pokok dan barang penting di masyarakat. selain itu, dilakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan barang pokok dan barang penting terhadap pasar yang

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp3.386.241.943 dan terealisasi Rp3.321.474.450 atau sebesar 98,09%.

Program program yang mendukung pencapaian Produk IKM yang Tefasilitasinya Expor antara Lain : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 2,34% atau senilai Rp347.958.405.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

SASARAN 2	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas di Wilayah	20%	20%	100%	21%	23.33	111%

Meningkatnya sarana distribusi perdagangan di wilayah Kinerja sarana distribusi perdagangan meningkat. Hal ini ditandai dengan pencapaian persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah sebesar 111%, yaitu dari target sebesar 21% terealisasi sebesar 23,33%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian meningkat sebesar 11,10% dan realisasi meningkat sebesar 3,33%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 93% dari target akhir renstra sebesar 25%. Dilihat pada skala nasional, persentase sarana distribusi perdagangan tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

   Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Bandung untuk mejalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha toko modern agar dapat memberikan fasilitasi

untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp47.660.000 dan realisasi sebesar Rp32.489.600 atau sebesar 68.17%.

2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan memperbaiki sarana dan prasarana distribusi barang/produk salah satunya ialah sarana dan prasarana pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan yang baik, bersih dan sehat. Pada Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.461.769.598 dan realisasi sebesar Rp1.355.432.392 atau sebesar 92.73%. Perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional yang dilakukan pada tahun 2024 sebanyak 4 pasar, yaitu Renovasi untuk Pasar Baleendah, Ciwidey, Majalaya, dan Margahayu.

3. Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

   Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi. TDG merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah tindak pidana ekonomi terhadap jenis-jenis barang tertentu yang diawasi peredarannya oleh Pemerintah. TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG. Jumlah gudang yang mendapatkan fasilitasi penerbitan TDG sebanyak 14 gudang. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 dan realisasi sebesar Rp13.934.800 atau sebesar 92.90%.

4. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Eletronik

   STPW merupakan bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi atau direkomendasi STPW dalam dan luar negeri sebanyak 10 pelaku usaha dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp15.000.000 dan realisasi sebesar Rp8.409.600 atau sebesar 56.06%.

5. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan pengelolaan distribusi perdagangan. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya pada Tahun 2024 sebanyak 11 Unit sarana prasarana pasar tradisional dengan nilai anggaran sebesar Rp229.450.000 dan terrealisasi sebesar Rp226.822.000 atau sebesar 98.85%.

6. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
   Kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemberian binaan kepada para pelaku sarana distribusi perdagangan. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan pada tahun 2024 sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp84.275.200 dan realisasi sebesar Rp82.291.300 atau sebesar 97.65%.

Program program yang mendukung pencapaian sarana distribusi perdagangan di wilayah Kinerja sarana distribusi perdagangan antara Lain : Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 9,94% atau senilai Rp176.799.106.

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3

SASARAN 3	**Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen**					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 204		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase alat UTTP sesuai standar	85%	85%	100%	90%	90.12%	100%

Perlindungan terhadap konsumen Kinerja perlindungan terhadap konsumen meningkat. Hal ini ditandai dengan pencapaian persentase alat UTTP sesuai standar sebesar 100,13%, yaitu dari target sebesar 90% terealisasi sebesar 90,12%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian meningkat sebesar 0,13% dan realisasi meningkat sebesar 5,12%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 90% dari target akhir renstra sebesar 100%. Dilihat pada skala nasional, persentase alat UTTP sesuai standar tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

Upaya untuk menigkatkan pelindungan komsumen dan tertib ukur dilakukan melalui peningkatan operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di wilayah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Bandung.

2. Dengan adanya UPT Kemetrologian diharapkan peran pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP yang selama ini dilakukan oleh Balai Kemetrologian Provinsi Jawa Barat bisa lebih optimal dapat memberikan pelayanan tera dan tera ulang laat UTTP untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur sehingga dapat meningkatan kepercayaan konsumen dan kinerja perdagangan dalam negeri dan telah dilakukan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 5.276 unit alat UTTP.
3. Sosialisasi tentang Kemetrologian

   Upaya untuk meningkatan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan peran kemetrologian dalam meningkatan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi dengan jumlah peserta 350 orang yang berasal dari pelaku usaha, instansi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah sendiri yang belum mengerti serta paham tentang apa itu kemetrologian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP. Sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi tentang kemetrologian.
4. Pengawasan Kemetrologian

   Pengawasan kemetrologian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif melalui terciptanya lingkungan usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabuapten Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2024 bekerjasama dengan Pengawas Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI terhadap 3.694 unit alat UTTP. Program program yang mendukung pencapaian perlindungan terhadap konsumen antara Lain : Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 9,92% atau senilai Rp27.605.229.

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4

SASARAN 4	Tertatanya Sentra Industri					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sentra Industri yang sudah tertata	40%	56%	140%	60%	61.40%	102%

Tertatanya sentra industri Kinerja tata kelola sentra industri mengalami penurunan capaian. Hal ini ditandai dengan pencapaian persentase sentra industri yang sudah tertata sebesar 102%, yaitu dari target sebesar 60% terealisasi sebesar 61,40%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian mengalami penurunan sebesar -38%, namun realisasi meningkat sebesar 5,40%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 61% dari target akhir renstra sebesar 100%.

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

   Dalam upaya meningkatan kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilanya dalam menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp7.509.993.190 dan realisasi sebesar Rp6.989.879.862 atau sebesar 93.07% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT,DAK FISIK,DAK NON FISIK. Pada tahun 2024 berbagai program seperti fasilitasi hibah peralatan, bimbingan teknis, dan sertifikasi, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Bandung, termasuk di bidang pengolahan tembakau, kopi, dan kriya, dengan target mencapai 50 IKM untuk Bimtek Memproses Pre Belending, 50 orang untuk bimtek Redrying Tembakau Korosok, 50 orang untuk bimtek memproses threshing tembakau rajangan, 50 orang untuk bimtek mengendalikan mutu hasil pre blending, 300 IKM untuk fasilitasi pendaftaran HAKI, 100 IKM untuk sertifikasi halal, 130 IKM untuk sertifikasi TKDN, 420 IKM untuk kegiatan musrenbang , 20 IKM Workshop menjahit Advance, 20 IKM Bimtek Manajemen Pengelolaan Sentra, 33 IKM untuk Bimtek Manajemen Keuangan, Bimtek Manajemen Pemasaran, Bimtek Manajemen Produksi, Bimtek Manajemen Wirausaha, Bimtek Manajemen SDM dan Sosialisasi Pendampingan Pengembangan

Produk, 30 IKM Bimtek Teknik Produksi Aneka Olahan kue , 20 IKM Bimtek Produksi Pakaian Jadi dan 100 IKM untuk FGD Proses Bisnis, 1 Unit Gedung Rumah Kemasan dan 8 unit mesin dan peralatan untuk IKM Olahan Makanan dan 28 unit mesin dan peralatan untuk Gedung Rumah kemasan.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

   Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung salah satunya industri kecil di bidang olahan makanan dan minuman yang merupakan salah satu industri kecil unggulan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dilakukan upaya kegiatan pelatihan kemasan bagi industri olahan makanan dan minuman selain itu juga diberikan fasilitasi desain produk bagi industri kecil secara gratis, fasilitasi pembuatan desain produk dan kemasan yang diberikan oleh Tim Desain dan Kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp813.986.000 dan realisasi sebesar Rp638.540.296 atau sebesar 78.45% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT,dan DID. Pada tahun 2024 IKM yang terpenuhi sarana prasarananya sebanyak 50 IKM untuk Bimtek Peningkatan Kualitas SDM IHT.

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

   Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri bersumber dari anggaran APBD dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan jumlah sebesar Rp349.929.000 realisasi sebesar Rp344.907.400 atau sebesar 98.56% dengan rincian kegiatan sebagai beribut :

   a. Dokumen Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
   b. Dokumen Kajian UPT Rumah Kemasan dan Pusat Promosi
   c. Sosialisasi dan pelatihan kemasan 20 orang

Program program yang mendukung pencapaian tata kelola sentra industri antara Lain : Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 8,01% atau senilai Rp700.580.632.

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5

SASARAN 5	Meningkatnya Kepatuhan Industri					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Industri	7.5%	9.33%	124%	10%	24%	240%

Kepatuhan industri Kinerja kepatuhan industri meningkat. Hal ini ditandai dengan pencapaian persentase kepatuhan industri sebesar 240%, yaitu dari target sebesar 10% terealisasi sebesar 24%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian meningkat sebesar 123% dan realisasi meningkat sebesar 15%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 160% dari target akhir renstra sebesar 15%.Dilihat pada skala nasional, Persentase kepatuhan industri tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

   Tujuan penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI adalah untuk pemberian izin kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan, mengembangkan, dan menambah kegiatan usaha. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, dilakukan dua kegiatan yaitu fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam SIINas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik. Kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki anggaran sebesar Rp129.290.000 dan terealisasi sebesar Rp119.644.500 atau sebesar 92.54%, dengan aktifitas kegiatan sebagai berikut :

   a. Fasilitasi perizinan IUI secara elektronik sebanyak 31 peserta yang terdiri dari IKM dan perusahaan industri
   b. Pelaksanaan pengawasan terhadap 35 Perusahaan industri.

Program program yang mendukung pencapaian kepatuhan industri antara Lain : Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 7,46% atau senilai Rp9.645.500.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -6

SASARAN 6	"Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor"					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Industri yang Terdata dalam SIINas	40%	40%	100%	60%	60%	100%

Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini meningkat. Hal ini ditandai dengan pencapaian Persentase industri yang terdata dalam SIINAS sebesar 130%, yaitu dari target sebesar 20% terealisasi sebesar 26%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian meningkat sebesar 44% dan realisasi meningkat sebesar 6%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 104% dari target akhir renstra sebesar 25%. Dilihat pada skala nasional, Persentase industri yang terdata dalam SIINAS tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI direalisasikan kedalam tiga kegiatan yaitu yang pertama fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selanjutnya yaitu Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Sedangkan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp386.352.221 dan realisasi sebesar Rp363.158.686 atau sebesar 94%

Program program yang mendukung pencapaian Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini antara Lain : Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 6,00% atau senilai Rp23.193.535.

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-7

SASARAN 7	Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan serta Pengendalian dan Pengawasan Industri Panas Bumi					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang Menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan	80%	80%	100.0%	80%	80%	100%

Kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi tetap stabil. Hal ini ditandai dengan pencapaian persentase pengelola pemanfaatan panas bumi yang menyampaikan laporan kinerja tahunan sebesar 100%, yaitu dari target sebesar 80% terealisasi sebesar 80%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tetap sama di angka 100%, tidak mengalami peningkatan atau penurunan.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 80%, yaitu dari target akhir renstra sebesar 100%.

Dilihat pada skala nasional, persentase pengelola pemanfaatan panas bumi yang menyampaikan laporan kinerja tahunan tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

   Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap panas bumi yang cukup banyak. Sampai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan Pengambangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang-Darajat dan Cibuni dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothemal Darajat II Limited (Darajat) serta PT. Teknosatria energi Geothermal (Cibuni). Namun, untuk wilayah cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi ekplorasi pemanfaatan panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnnya pemanfaatan volume uang panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan serbagai upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan panas bumi dengan instansi terkait baik itu pemrintah usat,

provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagi sumber energi. Potensi volume panas bumi di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2024 terdapat 4 potensi yang dapat dimanfaatkan dari total 5 potensi yang tersedia atau sebesar 80%.

Program program yang mendukung pencapaian Kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi antara Lain : Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Adapun efisiensi anggaran untuk mencapai 4,65% atau senilai Rp4.649.350.

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-8

SASARAN 8	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP Disperin	77	82	106%	84	84.6	101%

Pengukuran target kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kinerja nilai AKIP mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai AKIP sebesar 101%, yaitu dari target sebesar 84 terealisasi sebesar 84,6.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami penurunan capaian sebesar -5,78%, namun realisasi meningkat sebesar 2,6 poin.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja nilai AKIP tahun 2024 sudah mencapai batas aman dalam perencanaan jangka menengah dengan capaian 97% dari target akhir renstra sebesar 87.

Dilihat pada skala nasional, nilai AKIP tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian nilai AKIP dapat dilihat pada gambar berikut.

Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi antara lain

a. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

   Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diantaranya melalui pendampingan dan koordinasi dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan

pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA-PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah

Untuk meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah maka hal-hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

1. Kurangnya pengendalian dalam melaksanakan kebijakan/SOP terkait pengamanan aset kendaraan bermotor atas penguasaan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berhak, pencurian dan penggunaan aset kendaraan oleh pihak yang tidak berhak.
2. Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pelaksanaan kebijakan/ SOP Barang Milih Daerah.
3. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mengenai penyusunan laporan keuangan keuangan, inventarisasi barang-barang milik daerah, proses pengumpulan data realisasi anggaran dan SOP penyusunan laporan keuangan Kementerian
4. Kurangnya monitoring kepada pegawai yang telah ditunjuk sebagai pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola BMD, dan pengelola database secara rutin agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGNGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari sub sistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan

dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang - Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
    a. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis

menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

b. Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi akibat belum tersedianya data distributor dan pedagang eceran pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan penyaluran, lemahnya edukasi tentang regulasi pupuk bersubsidi, dan belum optimalnya penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.

2. Belum efektif dan efisiennya pelaksanaan pengembangan distribusi dan pemasaran produk dalam negeri
   a. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi dan promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri akibat kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi.
   b. Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk akibat rendahnya pengembangan kerja sama berbentuk kemitraan, kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi, serta kurangnya pemasaran produk dalam negeri.
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

   Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

4. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya.

   Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah

bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut.

5. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

   Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi

persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinu yang menyebabkan keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

   Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana dan kondisi mesin yang sudah tua

   Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah

   Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada industri kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.

Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.

II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Isu Strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
Regulasi Kepanasbumian belum ada	Belum keluarnya peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi	Potensi pemanfaatan langsung panas bumi belum optimal.	Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi.
		Tidak tersedianya dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi	Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi.
Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis	Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Masih banyak pedagang ditingkat eceran yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang strategis di atas harga eceran tertinggi (het)	Penetapan dan pengawasan harga yang kurang efektif menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di tingkat eceran, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi.
		Belum tersedianya data tentang produksi, kebutuhan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Ketiadaan data yang terintegrasi menghambat perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam mengelola distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis.
		Mekanisme pemantauan dan pengawasan harga dan stok	Pemantauan dan pengawasan yang kurang optimal terhadap harga dan stok barang strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		barang kebutuhan pokok dan barang strategis belum optimal	dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta potensi spekulasi harga.
		Belum adanya data tentang perdagangan antar wilayah	Ketiadaan data perdagangan antar wilayah menghambat analisis dan optimalisasi distribusi barang antar wilayah, yang dapat menyebabkan ketimpangan distribusi dan disparitas harga.
	Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi	Belum tersedianya data distributor, agen dan penjual eceran pupuk bersubsidi	Kurangnya data yang memadai tentang rantai distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan ketidakjelasan dalam pemantauan distribusi dan potensi penyalahgunaan subsidi.
		Masih lemahnya pengawasan penyaluran pupuk distribusi ditingkat distributor ke pedagang pengecer pupuk.	Pengawasan yang kurang kuat pada penyaluran pupuk di tingkat distributor dan pengecer mengakibatkan penyaluran yang tidak merata dan potensi penyimpangan distribusi.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		Masih lemahnya edukasi tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pupuk bagi distributor, agen dan pengecer pupuk.	Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil
		Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi (RDKK) masih belum optimal	Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil
Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi & promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri	Kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi	Intensifikasi promosi yang belum optimal
	Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk	Kurangnya pengembangan kerja sama kemitraan	Intensifikasi promosi yang belum optimal
		Kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi &	Intensifikasi promosi yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		pengenalan produk ke masyarakat luas	
		Masih kurangnya pemasaran produk dalam negeri	Intensifikasi promosi yang belum optimal
Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan	Masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin	Kurang pengawasan terhadap gudang	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
		Gudang tidak terdata dan belum memiliki izin	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
		Kurang pengawasan terhadap toko modern	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
	Penerima/ pemberi waralaba belum memiliki STPW	Kurang adanya sosialisasi STPW	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, gudang, dan perusahaan waralaba
	Pelayanan kemetrologian legal masih belum optimal	Kurangnya SDM penera yang dimiliki	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemetrologian legal.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		Belum optimalnya pelayanan metrologi legal atas permintaan wajib tera ulang (WTU)/OKO.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Belum terlaksananya pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar pemda/pasar desa secara menyeluruh.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)/barang dalam keadaan terbungkus (BDK) pasca tera/tera ulang belum optimal	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kemetrologian kepada masyarakat.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
Daya Saing Pasar Rakyat Masih rendah	Sarana dan prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat	Kurangnya pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Pengelolaan pasar rakyat belum optimal	Masih rendahnya kompetensi pengelola pasar rakyat	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pedagang pasar rakyat dan kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Sebagian harga komoditi di pasar rakyat kurang bersaing dan masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	Masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Kurang tertatanya PKL di sekitar pasar rakyat	PKL yang terorganisir	Belum tertatanya pedagang kaki lima di lingkungan sekitar pasar rakyat
Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan industri kecil menengah (IKM)	Masih lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri menjadi rendah	Rendahnya tingkat Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri/pelaku IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Bahan baku, barang modal dan bahan penolong masih tergantung pada produk impor	Masih terbatasnya bahan baku, barang modal dan bahan penolong lokal	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Masih rendahnya penerapan Standar Industri	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha Industri dalam menerapkan standar industri	Belum terbentuknya sentra industri
	Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang rencana pembangunan industri daerah	Belum tersedianya data industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perindustrian Daerah	Belum optimalnya pelaporan industri pada SIINAS
	Belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan.	Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM tentang pengelolaan manajemen keuangan.	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM	Kurangnya Modal Usaha yang dimiliki IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku IKM	Kurangnya tingkat pendidikan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimal pengelolaan modal/pembiayaan/manajemen usaha	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimalnya Legalitas Usaha/Legalitas Produk	Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap legal formal	Rendahnya Kesadaran Perusahaan industri dalam perizinan
	Belum optimalnya penggunaan media Promosi/Media Sosial	Kurangnya penguasaan IT di kalangan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum terbentuknya asosiasi Industri Per Komoditi IKM	Kurangnya motivasi membentuk asosiasi per komoditi	Belum terbentuknya Sentra Industri
Masih kurangnya IKM berpotensi Ekspor	Rendahnya peluang usaha bagi IKM	Belum tersedianya informasi peluang usaha bagi IKM	Intensifikasi Promosi IKM
	Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap bisnis ekspor	1. Kurangnya informasi pasar 2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri 3. kurangnya modal	Intensifikasi Promosi IKM

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANDUNG

Pada bagian *review* terhadap Rancangan RKPD dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengusulkan beberapa kegiatan di antaranya:

2. Peralatan kantor pendukung operasional Galeri Kriya Bedas
3. Pembelian mebel di Galeri Kriya Bedas dan UPTD
4. Belanja jasa keamanan dan *Cleaning Service* Galeri Kriya Bedas
5. Biaya pemeliharaan dan bayar pajak kendaraan pelayanan dan operasional Dinas
6. Fasilitasi rak gondola bagi IKM binaan
7. Pengadaan Mobile Laboratorium bahan Kepokmas
8. Pembelian alat MPOS (E-Retribusi) dan Lisensi
9. Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
10. Penambahan anggaran kegiatan OPM
11. Pameran INACRAFT, APKASI, Food Ethnik, Fasilitasi Pameran di Mall
12. Belanja modal peralatan pengujian UTTP
13. Belanja modal peralatan pengawasan UTTP
14. Bazar Ramadhan
15. Kegiatan bisnis *matching* P3DN
16. Sosialisasi dan fasilitasi P3DN
17. Kajian RIPIK

Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 31. *Review* terhadap Rancangan Tahun 2026

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disperdagin	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	100%	350.000.000	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Sudah Dikelola	80 %	161.767.200
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi Yang Dimanfaatkan	100%	350.000.000	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi yang Dimanfaatkan	28,71 %	161.767.200
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	30.537.000
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.116.200
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	27.114.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperdagin	Nilai AKIP	87%	37.582.682.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperdagin	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,00 Poin	37.684.568.800
							Disperdagin	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	57,00 Poin	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	589.240.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Nilai AKIP	85,50 Poin	528.718.276
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	269.850.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	354.363.776
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	94.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	41.654.500
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	37.160.000
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	85.540.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	85.540.000
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	59.500.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	10.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispergin	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	32.919.087.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispergin	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	32.929.087.000
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispergin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/bulan	32.880.087.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispergin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	##########	32.880.087.000
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispergin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispergin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dispergin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dispergin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispergin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispergin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	24.000.000
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dispergin	Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi	100%	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dispergin	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 %	5.000.000
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispergin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispergin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	100%	170.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 %	50.000.000
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disperdagin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disperdagin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperdagin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperdagin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100%	422.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	469.801.828
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.496.700
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.329.528
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.993.800
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	9.993.700

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan		Undangan yang Disediakan		
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	164.988.100
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagin	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagin	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	3.006.755.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.391.961.696
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.656.755.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.041.961.696
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Disperdagin	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	250.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Disperdagin	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	78,50 %	130.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah				
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	20.000.000
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
3.30.01.2.11	Adiminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	180.000.000	Adiminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	100 %	180.000.000
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	180.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Disperdagin	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	80%	233.500.000	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Disperdagin	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	65 %	141.957.374
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Disperdagin	Persentase Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Yang Memiliki Izin	80%	203.500.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Disperdagin	Persentase Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	90 %	88.957.374
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	203.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	88.957.374
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Persentase Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar	30%	15.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Persentase Penerbitan TDG	40 %	38.000.000
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	38.000.000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Waralaba Dalam Negeri Yang Diterbitkan STPW	10%	15.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Penerbitan STPW Sesuai Ketentuan	80 %	15.000.000
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda	1 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda	1 Dokumen	15.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik		Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik			Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik		Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik		
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	25%	-	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	-	-
3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	75%	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	-
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Disperdagin	Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan	3 Unit	-	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Disperdagin	Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan	-	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Disperdagin	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	11 Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Disperdagin	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	-
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	13%	2.037.500.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	44 %	2.019.962.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terkelola	1 Dokumen	1.950.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpenuhi	70 %	1.734.466.000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3%	1.900.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.621.882.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	54%	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	112.584.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase PKL Yang Telah Dilakukan Pembinaan	1 Laporan	87.500.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Tertib	66 %	285.496.000
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	89%	87.500.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	285.496.000
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	12 Laporan	815.000.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3 %	2.262.911.700
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang	Disperdagin	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang	12 Laporan	100.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang	Disperdagin	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang	85 %	99.211.200

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	99.211.200
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentasi Updating Data Harga dan Stok pada SIBAPOKTING	90%	700.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Updating Data Harga dan Stok SIBAPOKTING	100 %	2.152.805.900
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	15.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	11.486.200
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	727.432.463$$	15.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	12 Laporan	85.177.200

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	dalam Sistem Informasi Perdagangan					dalam Sistem Informasi Perdagangan		Sistem Informasi Perdagangan		
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3%	670.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.056.142.500
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Distributor Ke Pengecer	4 Pelaku Usaha	15.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	45 %	10.894.600
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Pelaku Usaha	15.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	10.894.600
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	3 Pelaku Usaha	511.378.000	Program Pengembangan Ekspor	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	950.853.317 $	888.602.050
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	15 Produk	511.378.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100,00 %	888.602.050
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	100%	150.000.000	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	######## #####	692.647.200
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100%	250.000.000	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	######## #####	99.236.750

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5000 Unit	50.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	#########	47.544.600
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	200 Orang	61.378.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1 Produk	49.173.500
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Disperdagin	Persentase Alat UTTP sesuai standar	42%	450.000.000	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Disperdagin	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	569.777.200
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	100%	450.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah	100 %	569.777.200
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur Alat Takar Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	40 UMKM	200.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.120 Unit	283.699.200
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 UMKM	250.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	75 Orang	286.078.000
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	100%	150.000.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	7,41 %	495.367.494
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung	5 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung	20 %	495.367.494
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	1 Dokumen	75.000.000	Pelaksanaan Promosi	Disperdagin	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi	30 UMKM	446.455.794

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail marketplace perhotelan dan jasa akomodasi	1 Dokumen	75.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	48.911.700
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperdagin	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	1 Dokumen	2.225.000.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperdagin	Persentase Peningkatan Sentra Industri	41 %	4.178.956.200
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.225.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Fasilitasi Pembangunan Industri	100 %	4.178.956.200
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	800.000.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	15%	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	792.720.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	20 Perusahaan	1.500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	2.411.236.200

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	50.000.000
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diawasi - Jumlah Program Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diimplementasikan	1 Dokumen	25.000.000
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	20%	-	Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Disperdagin	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	20%	200.000.000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Disperdagin	Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung	1,09	167.429.400
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Izin Industri Kecil Dan Menengah	1 Dokumen	200.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Disperdagin	Persentase Perusahaan Industri yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemantauan	60 %	167.429.400

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kab/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	1 Dokumen	41.059.400
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah selain bidang usaha tertentu yang	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk	Disperdagin	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil	1 Dokumen	126.370.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Based Approach (OSS RBA)		menjadi kewenangan pemerintah pusat			Based Approach (OSS RBA)		dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat		
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperdagin	Persentase pelaporan SIINAS	1 Rekomendasi	300.000.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperdagin	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	33 %	251.680.095
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Informasi Sektor Industri	15%	300.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Data Perusahaan Pada Aplikasi SIINas yang Valid	4,19 %	251.680.095
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20 Perusahaan	100.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	80.780.000
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	150.000.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	142.000.095
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan	1 Dokumen	50.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	1 Dokumen	28.900.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		
Total					44.855.060.000					48.822.979.513

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Rencana Kerja 2026, total kebutuhan awal yang semula sebesar Rp44.855.060.000 mengalami penyesuaian menjadi Rp48.822.979.513 Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses analisis mendalam terhadap 11 Program, 26 Kegiatan, dan 64 Sub Kegiatan yang telah diidentifikasi.

Dengan penyesuaian ini, diharapkan Rencana Kerja 2026 dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Musrembang diadakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Disperdagin dengan usulan dari kecamatan, serta menyelaraskan indikator, target, pendanaan, dan program antar dinas. Terdiri dari delegasi dari 62 kecamatan dan tamu undangan dari dinas terkait dan stakeholder.

Acara Forum Perangkat Daerah meliputi pembukaan, rapat pleno, pembahasan usulan program dan kegiatan, dan penandatanganan berita acara kesepakatan.

Tujuannya adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

TABEL T-C. 32.

DAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANG TAHUN 2026

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Pinggirsari	Arjasari	15	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 27.679.800
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Baros	Arjasari	15	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 27.679.800
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Tarajusari	Banjaran	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Banjaran Wetan	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 7.381.280

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mekarjaya	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 7.381.280
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Banjaran Kulon	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 7.381.280
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Mekarjaya	Banjaran	3	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 3.447.000
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Banjaran Kulon	Banjaran	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 5.745.000
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Tanjungsari	Cangkuang	20	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 36.906.400

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mekarlaksana	Cikancung	29	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 53.514.280
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Girimekar	Cilengkrang	12	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 22.143.840
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Melatiwangi	Cilengkrang	12	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 22.143.840
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cinunuk	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cimekar	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cibiru Hilir	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cileunyi Kulon	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
17	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cibiru Wetan	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
18	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Cinunuk	Cileunyi	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 5.745.000
19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Cinunuk	Cileunyi	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 5.745.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Cimekar	Cileunyi	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 11.490.000
21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Pasirhuni	Cimaung	21	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 38.751.720
22	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Mandalamekar	Cimenyan	0	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp -
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Babakan	Ciparay	37	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 42.513.000
24	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Panyocokan	Ciwidey	50	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp 17.181.300

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Panyocokan	Ciwidey	9	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 16.607.880
26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Rawabogo	Ciwidey	8	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 14.762.560
27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Rawabogo	Ciwidey	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 11.490.000
28	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Citeureup	Dayeuhkolot	15	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 27.679.800
29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Cangkuang Kulon	Dayeuhkolot	15	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 17.235.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Sudi	Ibun	50	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp 17.181.300
31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Karyalaksana	Ibun	11	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 20.298.520
32	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Karyalaksana	Ibun	11	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 20.298.520
33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Neglawangi	Kertasari	50	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp 17.181.300
34	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cikembang	Kertasari	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Neglawangi	Kertasari	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
36	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Tarumajaya	Kertasari	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
37	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Sukapura	Kertasari	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 6.894.000
38	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Neglawangi	Kertasari	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 5.745.000
39	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Gajah Mekar	Kutawaringin	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Padasuka	Kutawaringin	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
41	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Kopo	Kutawaringin	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
42	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Sukamulya	Kutawaringin	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
43	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Jatisari	Kutawaringin	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 5.745.000
44	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Pameuntasan	Kutawaringin	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 5.745.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Kopo	Kutawaringin	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 6.894.000
46	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Padaulun	Majalaya	18	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 33.215.760
47	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Biru	Majalaya	17	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 31.370.440
48	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Mekarrahayu	Margaasih	30	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 34.470.000
49	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Magahayu Selatan	Margahayu	50	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp 17.181.300

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Sukamenak	Margahayu	12	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 22.143.840
51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Nagreg Kendan	Nagreg	11	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 20.298.520
52	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Bojong	Nagreg	11	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 20.298.520
53	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Maruyung	Pacet	50	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp 17.181.300
54	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mandalahaji	Pacet	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mandalahaji	Pacet	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
56	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Maruyung	Pacet	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
57	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cananggela	Pacet	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
58	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cikitu	Pacet	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
59	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Maruyung	Pacet	13	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 14.937.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Bojongmanggu	Pameungpeuk	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 18.453.200
61	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Langonsari	Pameungpeuk	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 18.453.200
62	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Langonsari	Pameungpeuk	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 11.490.000
63	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Margamukti	Pangalengan	25	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 46.133.000
64	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Margamukti	Pangalengan	30	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 34.470.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mekarpawitan	Paseh	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
66	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mekarpawitan	Paseh	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 11.071.920
67	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Sukamanah	Paseh	8	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 14.762.560
68	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Drawati	Paseh	8	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 14.762.560
69	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cigentur	Paseh	8	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 14.762.560

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal, berupa tera, tera ulang	#MS Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang	Sugihmukti	Pasirjambu	50	Orang/Kegiatan	Rp 343.626	Rp 17.181.300
71	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Mekarmaju	Pasirjambu	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 18.453.200
72	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cibodas	Pasirjambu	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 18.453.200
73	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cisondari	Pasirjambu	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 18.453.200
74	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Cibodas	Pasirjambu	15	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 17.235.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Cipelah	Rancabali	0	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp -
76	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Alamendah	Rancabali	15	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 27.679.800
77	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki)	Jelegong	Rancaekek	35	Orang/Kegiatan	Rp 1.149.000	Rp 40.215.000
78	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Rancakasumba	Solokanjeruk	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
79	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Rancakasumba	Solokanjeruk	0	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Rancakasumba	Solokanjeruk	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
81	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Rancakasumba	Solokanjeruk	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600
82	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Rancakasumba	Solokanjeruk	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 9.226.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Padamukti	Solokanjeruk	7	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 12.917.240
84	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Bojongemas	Solokanjeruk	7	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 12.917.240
85	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan	Panyirapan	Soreang	18	Orang/Kegiatan	Rp 1.845.320	Rp 33.215.760
TOTAL PAGU USULAN MUSRENBANG KECAMATAN										Rp 1.377.584.000

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan, terdapat 85 usulan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang menjadi bahan diskusi dan diseleksi berdasarkan 3 kriteria teknis dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyetujui usulan musrembang melalui Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 sebanyak 85 usulan dengan nilai 1.377.584.000 untuk 1085 peserta dengan 3 jenis pelatihan, yaitu Bimtek Kemasan Bagi IKM, Sosialisasi Fasilitasi Merek (Hki), Sosialisasi dan Fasilitasi Tera / Tera Ulang.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS PERDAGNGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2026; dan RPJMD Kabupaten Bandung 2026-2030 dan RKPD Kabupaten Bandung 2026.

III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telaahan Kementerian Perindustrian

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Dalam upaya mendukung tercapainya visi

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kementerian Perindustrian menetapkan rencana strategis untuk periode 2025-2029 dengan tujuan utama

“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”. Rencana strategis ini berfokus pada penguatan daya saing industri Indonesia, dengan mendorong industrialisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada inovasi. Visi ini juga mencerminkan komitmen untuk mencapai :

”Indonesia Emas 2045”

yang merupakan tonggak seratus tahun kemerdekaan Indonesia, dengan peran sektor industri yang semakin dominan dalam perekonomian negara.

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian untuk periode 2025-2029 berfokus pada penguatan sektor perindustrian, yang diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Sesuai dengan RPJMN 2025-2029, sektor industri Indonesia harus

mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDB nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berbasis pada teknologi canggih.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memegang peran penting dalam mengimplementasikan rencana strategis ini di tingkat daerah. Salah satu fokus utama dari Kementerian Perindustrian adalah menguatkan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, serta mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik. Kabupaten Bandung, dengan kekayaan sumber daya alamnya, menjadi lokasi yang sangat potensial untuk mengembangkan industri pengolahan nonmigas, termasuk industri tekstil, pengolahan pangan, dan industri berbasis pertanian.

Pengembangan sektor perindustrian yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam rencana strategis ini, dengan memfokuskan pada industri hijau yang ramah lingkungan dan memanfaatkan energi terbarukan. Kementerian Perindustrian menetapkan bahwa industri yang berkembang harus dapat mengurangi jejak karbon, meningkatkan efisiensi energi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada. Di tingkat Kabupaten Bandung, ini membuka peluang untuk mengembangkan industri berbasis energi terbarukan, seperti pemanfaatan panas bumi, yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan energi bagi industri lokal.

Selain itu, hilirisasi industri menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing sektor industri Indonesia. Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan industri kreatif, yang dapat memberikan nilai tambah tinggi pada produk lokal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan berperan dalam mendorong program hilirisasi produk, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan volume ekspor produk dalam negeri. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat kemitraan antara IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan industri besar, agar produk-produk lokal dapat memenuhi standar kualitas pasar internasional.

Penguatan sektor IKM menjadi salah satu sasaran utama dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian, karena IKM merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus meningkatkan kapasitas IKM, terutama dalam aspek produktivitas, pemasaran, dan teknologi produksi. Program-program pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses pasar untuk IKM akan menjadi prioritas untuk mendukung IKM agar

dapat bersaing di pasar domestik maupun global. Untuk itu, kemudahan dalam akses pembiayaan, pemberdayaan kewirausahaan, dan penguatan ekosistem bisnis akan terus diperkuat.

Selain itu, kebijakan pengembangan kawasan industri yang terencana dengan baik akan memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan kawasan industri yang efisien akan membuka peluang bagi sektor industri untuk berkembang dengan meminimalkan dampak lingkungan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus mendukung pengelolaan kawasan industri dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk sektor industri, termasuk akses energi, jaringan distribusi, dan pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan.

Infrastruktur pendukung sektor industri juga menjadi prioritas dalam rencana strategis ini. Jaringan transportasi, pasokan energi yang stabil, serta aksesibilitas lahan industri akan diperkuat untuk memastikan kelancaran operasional sektor industri. Pembangunan infrastruktur di kawasan industri harus memperhatikan kebutuhan sumber daya energi terbarukan, terutama energi panas bumi, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan industri di Kabupaten Bandung.

Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor perindustrian, transformasi digital dalam sektor industri 4.0 juga menjadi bagian dari rencana strategis ini. Pengadopsian teknologi *Internet of Things (IoT), big data*, dan robotika dalam proses produksi dan distribusi akan membantu sektor industri meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan reduksi biaya produksi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus mempercepat transformasi digital ini, dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknologi kepada pelaku industri, khususnya pada IKM yang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi dan sumber daya.

Secara keseluruhan, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian untuk 2025-2029 bertujuan untuk memperkuat sistem industri nasional yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis pada inovasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam menerjemahkan kebijakan ini di tingkat daerah, dengan memastikan bahwa setiap langkah pengembangan sektor perindustrian dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Telaahan Kementerian Perdagangan

Dalam upaya mendukung tercapainya visi
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,
Kementerian Perdagangan menyusun rencana strategis untuk periode 2025-2029 dengan tujuan utama
“Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan dalam Perekonomian Nasional”. Tujuan ini mengarah pada penguatan sektor perdagangan domestik dan internasional, serta penciptaan iklim perdagangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun perekonomian yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, dengan sektor perdagangan memainkan peran penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk periode 2025-2029 mengarahkan sektor perdagangan sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional, seiring dengan tujuan meningkatkan daya saing pasar domestik dan memperluas akses pasar internasional. Tujuan utama yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan adalah untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat ekspor, serta memastikan distribusi barang dan jasa yang lebih merata di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan perdagangan di tingkat daerah, guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 adalah pengembangan pasar domestik dan perdagangan internasional. Untuk memperkuat sektor perdagangan domestik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan mengoptimalkan pasar tradisional dan pasar modern di wilayahnya, dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Dalam hal ini, kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur pasar, pengelolaan distribusi barang, dan penyediaan fasilitas perdagangan yang ramah lingkungan menjadi sangat penting.

Penguatan sektor perdagangan juga difokuskan pada ekspor produk lokal. Kementerian Perdagangan mendorong sektor industri dan perdagangan daerah untuk memperkuat kemampuan ekspor, dengan memfasilitasi akses pasar global bagi produk Indonesia. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan berperan dalam membantu pelaku usaha daerah untuk memperluas pasar ekspor mereka, baik melalui program sertifikasi produk, perizinan ekspor, maupun melalui promosi dagang yang efektif.

Dengan memperkuat sektor perdagangan internasional, diharapkan Kabupaten Bandung dapat memperoleh manfaat dari perdagangan bebas dan meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal di pasar dunia.

Dalam pengembangan perdagangan internasional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga akan mendukung penguatan kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral, sesuai dengan kebijakan nasional. Penyusunan kebijakan perdagangan yang lebih fasilitatif dan akses langsung ke pasar internasional akan menjadi prioritas untuk mendorong ekspor produk unggulan Kabupaten Bandung. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur perdagangan, termasuk pelabuhan, terminal distribusi, dan sistem logistik, akan memperlancar arus barang dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Selanjutnya, pendampingan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga menjadi salah satu aspek penting dalam rencana strategis sektor perdagangan. IKM di Kabupaten Bandung, yang banyak bergerak dalam sektor kerajinan tangan, pangan, dan tekstil, akan diberdayakan melalui akses pasar, kemudahan pembiayaan, serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya. Program pemasaran digital dan platform e-commerce akan semakin memperkuat posisi IKM Kabupaten Bandung dalam pasar domestik dan internasional.

Pengelolaan pasar juga menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan. Pengembangan pasar tradisional yang menjadi tempat utama bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari akan diupayakan melalui peningkatan infrastruktur pasar, seperti renovasi fasilitas pasar, peningkatan sistem pengelolaan pasar, serta pemberdayaan pedagang agar dapat menjalankan usaha secara lebih modern dan efisien. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga akan memperhatikan aspek keamanan pangan dan standarisasi produk untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Transformasi digital dalam sektor perdagangan akan menjadi langkah strategis dalam mendukung kemajuan sektor ini. Peningkatan akses pasar melalui platform *e-commerce* serta penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan distribusi barang dan manajemen perdagangan akan diimplementasikan untuk mendukung sektor perdagangan yang lebih modern dan efisien. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan mengintegrasikan teknologi digital dalam proses perdagangan, memungkinkan pelaku usaha lokal untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pentingnya peraturan dan kebijakan perdagangan yang jelas dan fasilitasi perizinan yang lebih efisien juga menjadi perhatian dalam rencana strategis ini. Penyederhanaan prosedur administratif untuk izin usaha, sertifikasi produk, serta kemudahan dalam proses ekspor-impor akan mempercepat operasional sektor perdagangan, sehingga sektor ini bisa tumbuh dengan lebih baik. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah dapat mendukung sektor perdagangan yang kompetitif, transparan, dan efisien.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGNGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

1) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah produktivitas perindustrian yang berdaya saing

2. Sasaran

1) Meningkatnya Persentase Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

2) Meningkatnya Presentase Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Tabel T-C. 33

Tabel Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Meningkatnya Persentase Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan		
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung		
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting			
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
						Agen dan Pasar Rakyat	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase updating data harga dan stok SIBAPOKTING di tingkat pasar		
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer		
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
						Realisasi Minimal 90%	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola		
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar		
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase gudang yang memiliki tanda daftar		
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW		
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP sesuai standar			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera yang sah		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
			Penyidikan Metrologi Legal			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	
		Meningkatnya Presentase Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana pembangunan industri		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
						Perwilayahan Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri	
			Perizinan Berusaha Terintegrasi			dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang	
			secara Elektronik			Terintegrasi dengan Sistem OSS	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pelaporan SIINAS			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri		
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola			
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan		
			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	

x

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk Tahun 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mempunyai Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    2) Administrasi keuangan perangkat daerah
    3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah
    4) Administrasi umum perangkat daerah
    5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
    8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
    1) Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota

3) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
    1) Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
    2) Penerbitan tanda daftar gudang
    3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri

4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
    2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota
   2) Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
   3) Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota

6) Program Pengembangan Ekspor

   1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

   1) Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan

8) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

   1) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri

9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   1) Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota

10) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

   1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota

11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

   1) Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN BANDUNG

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Sudah Dikelola	80 %	350.000.000	161.767.200	APBD Kab. Bandung	80 %	350.000.000,00	Disperdagin
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi yang Dimanfaatkan	28,71 %	350.000.000	161.767.200	APBD Kab. Bandung	28,71 %	350.000.000,00	Disperdagin
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000	30.537.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	Disperdagin
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	104.116.200	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	250.000.000,00	Disperdagin
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	50.000.000	27.114.000	APBD Kab. Bandung	20 Laporan	50.000.000,00	Disperdagin
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperdagin	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83Poin	37.582.682.000	37.684.568.800	APBD Kab. Bandung	83,40 Poin	37.582.682.000,00	Disperdagin
		Disperdagin	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	57Poin			APBD Kab. Bandung	57,50 Poin		Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Nilai AKIP	85,50 Poin	589.240.000	528.718.276	APBD Kab. Bandung	86Poin	589.240.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	269.850.000	354.363.776	APBD Kab. Bandung	10 Dokumen	269.850.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	94.350.000	41.654.500	APBD Kab. Bandung	6 Laporan	94.350.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	80.000.000	37.160.000	APBD Kab. Bandung	7 Laporan	80.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	85.540.000	85.540.000	APBD Kab. Bandung	2 Dokumen	85.540.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	59.500.000	10.000.000	APBD Kab. Bandung	60 Data	59.500.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	32.919.087.000	32.929.087.000	APBD Kab. Bandung	100 %	32.919.087.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 Orang/bulan	32.880.087.000	32.880.087.000	APBD Kab. Bandung	211 Orang/bulan	32.880.087.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	2 Laporan	14.000.000	24.000.000	APBD Kab.	2 Laporan	14.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Bandung			
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 %	5.000.000	5.000.000	APBD Kab. Bandung	100 %	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 %	170.000.000	50.000.000	APBD Kab. Bandung	100 %	170.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disperdagin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	70.000.000	-	APBD Kab. Bandung	1 Paket	70.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperdagin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100.000.000	50.000.000	APBD Kab. Bandung	2 Orang	100.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	422.500.000	469.801.828	APBD Kab. Bandung	100 %	422.500.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	17.496.700	APBD Kab. Bandung	1 Paket	7.500.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	147.329.528	APBD Kab. Bandung	1 Paket	125.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10.000.000	-	APBD Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	9.993.800	APBD Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	100.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Paket	80.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	9.993.700	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	20.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	165.000.000	164.988.100	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	165.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagin	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	40.000.000	-	APBD Kab. Bandung	100 %	40.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	40.000.000	-	APBD Kab. Bandung	1 Unit	40.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.006.755.000	3.391.961.696	APBD Kab. Bandung	100 %	3.006.755.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000	350.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	350.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.656.755.000	3.041.961.696	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	2.656.755.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	78,50 %	250.100.000	130.000.000	APBD Kab. Bandung	78,50 %	250.100.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000	40.000.000	APBD Kab. Bandung	10 Unit	40.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000	70.000.000	APBD Kab. Bandung	12 Unit	70.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	15.000.000	20.000.000	APBD Kab. Bandung	4 Unit	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	125.100.000	-	APBD Kab. Bandung	1 Unit	125.100.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.11	Adiminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	100 %	180.000.000	180.000.000	APBD Kab. Bandung	100 %	180.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000	180.000.000	APBD Kab. Bandung	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	Disperdagin
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Disperdagin	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	65 %	233.500.000	141.957.374	APBD Kab. Bandung	65 %	233.500.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Disperdagin	Persentase Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	90 %	203.500.000	88.957.374	APBD Kab. Bandung	90 %	201.000.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	203.500.000	88.957.374	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	201.000.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Persentase Penerbitan TDG	40 %	15.000.000	38.000.000	APBD Kab. Bandung	40 %	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000	38.000.000	APBD Kab.	1 Dokumen	15.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Bandung			
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Penerbitan STPW Sesuai Ketentuan	80 %	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandung	80 %	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	APBD Kab. Bandung	60 %	1.500.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	-	-	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	1.500.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Disperdagin	Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan	-	-	-	APBD Kab. Bandung	60 %	1.000.000,00	Disperdagin
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Disperdagin	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	-	-	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	1.000.000,00	Disperdagin
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	44 %	2.037.500.000	2.019.962.000	APBD Kab. Bandung	44 %	2.037.500.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpenuhi	70 %	1.950.000.000	1.734.466.000	APBD Kab. Bandung	70 %	1.950.000.000,00	Disperdagin
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.900.000.000	1.621.882.000	APBD Kab. Bandung	3 Unit	1.900.000.000,00	Disperdagin
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	50.000.000	112.584.000	APBD Kab. Bandung	20 Unit	50.000.000,00	Disperdagin
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Tertib	66 %	87.500.000	285.496.000	APBD Kab. Bandung	66 %	87.500.000,00	Disperdagin
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	87.500.000	285.496.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	87.500.000,00	Disperdagin
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3 %	815.000.000	2.262.911.700	APBD Kab. Bandung	3 %	815.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	85 %	100.000.000	99.211.200	APBD Kab. Bandung	85 %	100.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	100.000.000	99.211.200	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	100.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Updating Data Harga dan Stok SIBAPOKTING	100 %	700.000.000	2.152.805.900	APBD Kab. Bandung	100 %	700.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	12 Laporan	15.000.000	11.486.200	APBD Kab.	12 Laporan	15.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				Bandung			
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	15.000.000	85.177.200	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	670.000.000	2.056.142.500	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	670.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	45 %	15.000.000	10.894.600	APBD Kab. Bandung	45 %	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	15.000.000	10.894.600	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	950.853.317 $	511.378.000	888.602.050	APBD Kab. Bandung	960.267.706 $	411.378.000,00	Disperdagin
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100%	511.378.000	888.602.050	APBD Kab. Bandung	100%	411.378.000,00	Disperdagin
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000	692.647.200	APBD Kab. Bandung	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Disperdagin
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	250.000.000	99.236.750	APBD Kab. Bandung	5 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Disperdagin
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	50.000.000	47.544.600	APBD Kab.	2 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Bandung			
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1 Produk	61.378.000	49.173.500	APBD Kab. Bandung	1 Produk	61.378.000,00	Disperdagin
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Disperdagin	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	450.000.000	569.777.200	APBD Kab. Bandung	100 %	450.000.000,00	Disperdagin
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah	100 %	450.000.000	569.777.200	APBD Kab. Bandung	100 %	450.000.000,00	Disperdagin
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.120 Unit	200.000.000	283.699.200	APBD Kab. Bandung	5.120 Unit	200.000.000,00	Disperdagin
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	75 Orang	250.000.000	286.078.000	APBD Kab. Bandung	75 Orang	250.000.000,00	Disperdagin
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	7,41 %	150.000.000	495.367.494	APBD Kab. Bandung	7,41 %	250.000.000,00	Disperdagin
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung	20 %	150.000.000	495.367.494	APBD Kab. Bandung	20 %	250.000.000,00	Disperdagin
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	75.000.000	446.455.794	APBD Kab. Bandung	30 UMKM	175.000.000,00	Disperdagin
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	75.000.000	48.911.700	APBD Kab. Bandung	30 UMKM	75.000.000,00	Disperdagin
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperdagin	Persentase Peningkatan Sentra Industri	41 %	2.225.000.000	4.178.956.200	APBD Kab. Bandung	52 %	2.225.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Fasilitasi Pembangunan Industri	100 %	2.225.000.000	4.178.956.200	APBD Kab. Bandung	100 %	2.225.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	100.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	100.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50.000.000	800.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	500.000.000	792.720.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	500.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000	2.411.236.200	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	1.495.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diawasi - Jumlah Program Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diimplementasikan	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	25.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	5.000.000,00	Disperdagin
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Disperdagin	Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung	1,09	200.000.000	167.429.400	APBD Kab. Bandung	1,14	200.000.000,00	Disperdagin
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Disperdagin	Persentase Perusahaan Industri yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemantauan	60 %	200.000.000	167.429.400	APBD Kab. Bandung	60 %	200.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kab/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	1 Dokumen	100.000.000	41.059.400	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	100.000.000,00	Disperdagin
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	1 Dokumen	100.000.000	126.370.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	100.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperdagin	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	33 %	300.000.000	251.680.095	APBD Kab. Bandung	33 %	300.000.000,00	Disperdagin
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Data Perusahaan Pada Aplikasi SIINas yang Valid	4,19 %	300.000.000	251.680.095	APBD Kab. Bandung	4,35 %	300.000.000,00	Disperdagin
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	100.000.000	80.780.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	100.000.000,00	Disperdagin
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	150.000.000	142.000.095	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	Disperdagin
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	50.000.000	28.900.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	Disperdagin
TOTAL					44.855.060.000	48.822.979.513			44.855.060.000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGNGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Jawa Barat, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Sudah Dikelola	80 %	161.767.200

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi yang Dimanfaatkan	28,71 %	161.767.200
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	30.537.000
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.116.200
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	27.114.000
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperdagin	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83Poin	37.684.568.800
		Disperdagin	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	57Poin	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Nilai AKIP	85,50 Poin	528.718.276
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	354.363.776
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	41.654.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	37.160.000
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	85.540.000
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	10.000.000
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	32.929.087.000
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 Orang/bulan	32.880.087.000
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	24.000.000
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 %	5.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 %	50.000.000
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disperdagin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperdagin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	469.801.828
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.496.700
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.329.528
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.993.800
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.993.700

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	164.988.100
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagin	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.391.961.696
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.041.961.696
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	78,50 %	130.000.000
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	20.000.000
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
3.30.01.2.11	Adiminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	100 %	180.000.000
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Disperdagin	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	65 %	141.957.374
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Disperdagin	Persentase Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	90 %	88.957.374
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	88.957.374
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Persentase Penerbitan TDG	40 %	38.000.000
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	38.000.000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Penerbitan STPW Sesuai Ketentuan	80 %	15.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	15.000.000
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	-	-
3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	-
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Disperdagin	Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan	-	-
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Disperdagin	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	-
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	44 %	2.019.962.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpenuhi	70 %	1.734.466.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.621.882.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	112.584.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Tertib	66 %	285.496.000
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	285.496.000
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3 %	2.262.911.700
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	85 %	99.211.200
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	99.211.200
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Updating Data Harga dan Stok SIBAPOKTING	100 %	2.152.805.900
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	11.486.200

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	85.177.200
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.056.142.500
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	45 %	10.894.600
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	10.894.600
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	950.853.317 $	888.602.050
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100%	888.602.050
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	692.647.200
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	99.236.750
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	47.544.600

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	1 Produk	49.173.500
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Disperdagin	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	569.777.200
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah	100 %	569.777.200
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.120 Unit	283.699.200
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	75 Orang	286.078.000
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	7,41 %	495.367.494
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase Promosi dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung	20 %	495.367.494
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	446.455.794
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	48.911.700
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperdagin	Persentase Peningkatan Sentra Industri	41 %	4.178.956.200

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Fasilitasi Pembangunan Industri	100 %	4.178.956.200
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	800.000.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	792.720.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2.411.236.200
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	50.000.000
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diawasi - Jumlah Program Pengawasan Jaminan Produk Halal yang Dapat Diimplementasikan	1 Dokumen	25.000.000
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Disperdagin	Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung	1,09	167.429.400

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Perusahaan Industri yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemantauan	60 %	167.429.400
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kab/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	1 Dokumen	41.059.400

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	1 Dokumen	126.370.000
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperdagin	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	33 %	251.680.095
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Data Perusahaan Pada Aplikasi SIINas yang Valid	4,19 %	251.680.095
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	80.780.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Penetapan
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	142.000.095
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	28.900.000
TOTAL					48.822.979.513

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026 ini membutuhkan total dana sebesar Rp48.822.979.513 untuk melaksanakan 11 program, 24 kegiatan, dan 64 sub kegiatan.

Penyusunan rencana ini didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas program yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya rencana ini, program-program yang tercantum dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB V
P E N U T U P

V.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerja sama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Barat.

V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan strategis dalam siklus manajemen pembangunan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen korektif dan adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Fungsi pengendalian mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja, dan penggunaan anggaran. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi internal secara periodik, supervisi lapangan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing urusan.

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis

Soreang, Juli 2025

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

TTD

DICKY ANUGRAH

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA